

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGKONSTRUKSI OPINI PUBLIK
TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH: STUDI KASUS WACANA PUBLIK
TAHUN 2025**

Rahmatul Hidayat¹⁾, Imran²⁾, Rury Ramadhan²⁾

¹Email: attulahyadi86@gmail.com

^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti, Makassar

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti, Makassar

Keyword: *Social Media, Public Opinion, Government Policy, Agenda-Setting*

Abstract: *This study analyzes the transformative role of social media in constructing public opinion regarding government policies in Indonesia from April to August 2025. Using a descriptive qualitative approach, critical discourse analysis, and sentiment analysis on social media data, the study identifies how digital platforms have become a primary arena for the formation and mobilization of public opinion. The findings indicate a dissonance between the government's agenda and public discourse on social media, which is dominated by reactive and controversial issues such as the #DarkIndonesia protests and the revision of the TNI Law. The Constitutional Court's ruling on the ITE Law also shows a direct impact on freedom of expression, potentially reducing the spiral of silence effect. Furthermore, social media serves as an effective social control mechanism in corruption cases, but also poses the risk of "viral-based policies" that can disrupt stability. The study concludes that social media is a transformative force that demands a more transparent and responsive government communication strategy, as well as strong digital literacy among the public.*

Kata Kunci: *Media Sosial, Opini Publik, Kebijakan Pemerintah, Agenda-Setting*

Abstrak: *Penelitian ini menganalisis peran transformatif media sosial dalam mengkonstruksi opini publik terkait kebijakan pemerintah di Indonesia selama periode April hingga Agustus 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, analisis wacana kritis, dan analisis sentimen terhadap data media sosial, studi ini mengidentifikasi bagaimana platform digital telah menjadi arena utama pembentukan dan mobilisasi opini publik. Temuan menunjukkan adanya disonansi antara agenda pemerintah dan wacana publik di media sosial, yang didominasi oleh isu-isu reaktif dan kontroversial seperti protes #IndonesiaGelap dan Revisi UU TNI. Putusan*

Mahkamah Konstitusi terkait UU ITE juga menunjukkan dampak langsung pada kebebasan berekspresi, berpotensi mengurangi efek spiral keheningan. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam kasus korupsi, namun juga memunculkan risiko "viral based policy" yang dapat mengganggu stabilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa media sosial adalah kekuatan transformatif yang menuntut strategi komunikasi pemerintah yang lebih transparan dan responsif, serta literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat.

PENDAHULUAN

Lanskap komunikasi politik di Indonesia telah mengalami transformasi fundamental seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial, yang dulunya hanya platform interaksi personal, kini telah berevolusi menjadi arena utama bagi pembentukan dan penyebaran opini publik. Pergeseran ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dipersepsikan, didiskusikan, dan pada akhirnya membentuk opini kolektif di ruang digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap komunikasi politik secara drastis, menjadikan media sosial sebagai arena utama pembentukan opini publik. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan signifikan dalam akses dan penggunaan internet serta media sosial di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, terdapat 212 juta pengguna internet di Indonesia, dengan tingkat penetrasi mencapai 74.6% dari total populasi. Lebih lanjut, jumlah identitas pengguna media sosial aktif mencapai 143 juta, setara dengan 50.2% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2.9% dari tahun sebelumnya, menegaskan relevansi platform ini dalam kehidupan masyarakat dan politik Indonesia.

Data mengenai median usia populasi Indonesia pada awal 2025 yang berada di angka 30.4 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial adalah generasi muda dan produktif. Kelompok demografi ini cenderung lebih aktif secara digital, lebih cepat mengadopsi tren, dan seringkali lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, media sosial bukan sekadar platform tambahan, melainkan lingkungan utama di mana opini publik terbentuk dan berkembang di kalangan segmen populasi yang paling dinamis dan berpengaruh. Dinamika wacana di media sosial memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah kebijakan dan stabilitas sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam pembentukan opini publik terkait kebijakan pemerintah, mengidentifikasi isu-isu kunci, serta mengkaji mekanisme dan implikasi dari proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, mengaplikasikan analisis wacana kritis dan analisis sentimen terhadap data yang relevan dari media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami peran media sosial dalam mengkonstruksi opini publik, penting untuk merujuk pada beberapa teori komunikasi massa yang relevan, serta karakteristik unik dari media sosial itu sendiri. Opini publik dapat didefinisikan sebagai kesepakatan sikap, pendapat, dan pandangan yang diekspresikan oleh beberapa orang setelah mendiskusikan suatu isu. Proses pembentukannya melibatkan tiga tahap. Tahap pertama adalah ketika opini mencari bentuknya. Tahap selanjutnya, opini publik sudah memiliki bentuk, namun masih dapat berubah-ubah. Tahap terakhir, opini publik

sudah kuat dan tidak mudah berubah. Lima syarat utama dalam pembentukan opini publik meliputi: adanya isu, adanya kelompok yang dikenal dan berkepentingan terhadap isu tersebut, adanya pilihan yang sulit, adanya suatu pernyataan atau opini, dan adanya sejumlah orang yang terlibat. Opini publik tidak selalu terbentuk secara organik; ia juga dapat direkayasa atau direncanakan.

Manipulated Public Opinion adalah rekayasa pemerintah untuk membentuk persepsi tertentu, seperti yang terjadi pasca serangan 11 September 2001 ketika pemerintah Amerika Serikat membangun opini bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal sebagai alasan untuk menyerang negara tersebut, meskipun data intelijen tidak mendukung klaim tersebut. Sementara itu, *Planned Public Opinion* bertujuan membangun atau mempertahankan citra positif suatu negara atau pemerintahan, seperti upaya pemerintah Indonesia memperbaiki citra HAM di mata dunia untuk mengatasi embargo senjata.

Media sosial secara inheren mendukung setiap unsur dan tahapan pembentukan opini publik. Platform ini menyediakan ruang instan untuk diskusi isu, memfasilitasi ekspresi pendapat dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, dan video, serta dengan cepat mengidentifikasi kelompok berkepentingan melalui fitur-fitur seperti tagar atau grup. Kecepatan dan jangkauan media sosial berarti bahwa opini publik dapat terbentuk dan menguat jauh lebih cepat dibandingkan era media tradisional. Namun, ini juga berarti bahwa proses manipulasi atau perencanaan opini publik dapat dilakukan dengan lebih canggih dan masif, seringkali sulit dibedakan dari opini organik. Hal ini meningkatkan kompleksitas dalam memahami opini publik yang "sebenarnya" dan tantangan bagi pemerintah dalam mengelola narasi.

Peran Media dalam Wacana Publik

Media massa berperan sebagai "jendela besar" bagi publik untuk mengamati dunia, menciptakan kerangka interpretasi yang memengaruhi cara individu memahami peristiwa. Ini berarti media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi secara aktif mengkonstruksi makna dalam benak audiens melalui seleksi, penyusunan, dan presentasi informasi. Marshall McLuhan, sebagaimana dikutip oleh Liliweri, memandang media sebagai "perluasan manusia" (*the extensions of man*), menunjukkan hubungan erat antara eksistensi manusia dan media akibat perkembangan budaya. Media massa diyakini bukan sekadar sarana lalu lintas pesan, tetapi juga alat untuk menundukkan dan memaksakan konsensus oleh kelompok ekonomi dan politik dalam bentuk hegemoni media.

Tommy Satriadi Nur Arifin (2025) menjelaskan bahwa media massa tradisional menciptakan "jendela besar" bersama. Namun, ia juga secara eksplisit menyatakan bahwa munculnya media sosial menyajikan realitas yang terfragmentasi dalam ribuan komunitas online. Setiap individu dapat memilih algoritma yang menyesuaikan konten dengan preferensi mereka, menciptakan "gelembung filter". Ini bukan sekadar diversifikasi sumber informasi; ini adalah pergeseran fundamental dari satu realitas bersama menjadi banyak realitas yang terpisah. Akibatnya, pembentukan opini publik terkait kebijakan pemerintah menjadi sangat beragam dan seringkali terkotak-kotak sesuai kelompok kepentingan. Hal ini mempersulit pencapaian konsensus nasional dan dapat memperdalam polarisasi, karena kelompok-kelompok yang berbeda mungkin beroperasi dengan pemahaman realitas yang sangat berbeda tentang kebijakan yang sama.

Teori Komunikasi dalam Konstruksi Opini Publik di Media Sosial

Teori Agenda-Setting, yang pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw (1972), menyatakan bahwa lembaga media dapat menentukan isu apa yang ingin mereka angkat ke dalam pemberitaan, sehingga memengaruhi apa yang dipikirkan publik *tentang* suatu isu. Teori ini beroperasi pada dua tingkatan: penonjolan isu (topik mana yang dianggap penting bagi publik) dan penonjolan atribut (bagaimana isu atau kandidat dibingkai, misalnya sifat atau karakteristik apa yang ditekankan media). Contoh relevan di Indonesia adalah liputan media yang luas tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berhasil menjaga kebijakan ini tetap menjadi

prioritas utama dalam agenda publik dan percakapan sehari-hari masyarakat.

Jika teori Agenda-Setting tradisional berfokus pada kekuatan media massa dalam menentukan isu, media sosial menambahkan dimensi baru. Viralnya tagar atau isu tertentu, seperti #IndonesiaGelap, dapat dengan cepat mengangkat suatu topik ke puncak agenda publik, bahkan tanpa inisiasi atau liputan masif dari media tradisional. Media sosial mendesentralisasi kekuatan agenda-setting, memungkinkan isu-isu yang berasal dari akar rumput atau kelompok minoritas untuk mendapatkan visibilitas yang luas. Ini berarti pemerintah tidak lagi hanya berhadapan dengan agenda yang ditetapkan oleh media mainstream, tetapi juga dengan agenda yang secara dinamis dibentuk dan diubah oleh pengguna media sosial itu sendiri, menuntut strategi komunikasi yang lebih adaptif dan responsif.

Teori pembingkai menjelaskan bagaimana media memilih dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk memengaruhi interpretasi dan opini audiens. Pilihan kata, gambar, dan narasi yang digunakan dapat mengarahkan audiens pada interpretasi tertentu. Studi kasus menunjukkan bahwa media di Indonesia dapat membingkai isu secara selektif; misalnya, CNN Indonesia cenderung mendukung pemerintah pada isu stabilitas demokrasi, tetapi mengkritik pada isu kontroversial seperti perubahan batas usia calon kepala daerah. Pembingkai juga digunakan untuk mengkomodifikasi identitas politik (agama dan etnis) guna memengaruhi opini pemilih dan menyebabkan polarisasi.

Chadwick (2017) memperkenalkan konsep "sistem media hibrida" (*hybrid media system*), di mana media tradisional berinteraksi dengan platform digital. Dalam sistem hibrida ini, algoritma media sosial memainkan peran krusial dalam pembingkai. Algoritma ini cenderung menghadirkan konten yang sudah sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan "gelembung filter". Ini berarti bahwa pembingkai yang diterima individu di media sosial tidak hanya ditentukan oleh media itu sendiri, tetapi juga oleh preferensi algoritmik mereka. Akibatnya, pandangan yang sudah ada diperkuat, dan paparan terhadap perspektif yang berbeda berkurang. Hal ini secara kausal memperkuat polarisasi opini terhadap kebijakan pemerintah, karena setiap kelompok opini terus-menerus terpapar pada bingkai yang mengonfirmasi bias mereka, membuat dialog lintas-kelompok semakin sulit dan menciptakan "ruang gema" yang homogen.

Teori Spiral Keheningan (Noelle-Neumann, 1984) menyatakan bahwa individu cenderung menahan diri untuk tidak menyuarakan opini minoritas karena takut terisolasi, sehingga pandangan mayoritas tampak lebih dominan. Di media sosial, persepsi kesesuaian opini dengan mayoritas secara signifikan memengaruhi kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam forum online. Namun, terdapat kontradiksi langsung dalam data mengenai penerapan Teori Spiral Keheningan di media sosial. Beberapa sumber menunjukkan bahwa ketakutan akan isolasi masih memengaruhi kesediaan berekspresi online, sementara sumber lain menyajikan kasus di mana anonimitas di media sosial justru mendorong suara minoritas untuk lebih berani berekspresi. Studi dari Universitas Indonesia (2012) juga menegaskan bahwa penerapannya di negara transisi demokrasi seperti Indonesia bersifat situasional, bergantung pada pengetahuan politik, konten moral, dan konformitas. Kontradiksi ini bukan sekadar perbedaan hasil, melainkan indikasi bahwa media sosial bukanlah ruang yang seragam dalam hal kebebasan berekspresi. Faktor-faktor seperti tingkat anonimitas yang ditawarkan oleh platform, sifat sensitivitas isu kebijakan pemerintah, dan persepsi individu terhadap risiko sosial atau hukum, secara signifikan memengaruhi apakah efek spiral keheningan akan berlaku atau justru tereduksi. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik yang terbentuk di media sosial bisa jadi tidak sepenuhnya merepresentasikan keragaman pandangan masyarakat, baik karena penindasan suara minoritas maupun karena pemberdayaan suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan.

Analisis Wacana Publik Terkait Kebijakan Pemerintah (April-Agustus 2025)

Periode April hingga Agustus 2025 di Indonesia ditandai oleh beberapa kebijakan dan peristiwa penting yang memicu wacana publik intens di media sosial. Meskipun pemerintah mengumumkan kebijakan-kebijakan strategis, respons publik di media sosial cenderung didominasi oleh isu-isu

kontroversial dan kritik, menunjukkan adanya disonansi antara agenda pemerintah dan agenda publik di ranah digital.

Pada periode ini, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menekankan dasar kebijakan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan fokus pada swasembada pangan, energi, manajemen air yang baik, dan industrialisasi. Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 8/2025 untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Data menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan strategis jangka panjang seperti swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan. Namun, analisis studi kasus di bawah ini akan menunjukkan bahwa wacana publik di media sosial pada periode yang sama justru didominasi oleh isu-isu yang bersifat reaktif dan kontroversial. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara apa yang ingin pemerintah komunikasikan sebagai prioritas dan apa yang benar-benar menjadi perhatian atau kritik publik di media sosial. Media sosial, dengan kemampuannya mempercepat penyebaran informasi dan memobilisasi sentimen, cenderung lebih responsif terhadap isu-isu yang memicu emosi atau ketidakpuasan, sehingga menggeser fokus agenda publik dari kebijakan-kebijakan yang lebih luas dan terencana.

Tabel berikut menyajikan gambaran isu-isu kebijakan pemerintah dan wacana publik yang berkembang di media sosial selama periode April hingga Agustus 2025. Tabel ini berguna untuk memvisualisasikan kompleksitas dan keragaman wacana publik secara cepat dan terstruktur, serta memungkinkan perbandingan langsung antara isu-isu berbeda dalam hal platform dominan, sentimen kunci, dan dampak signifikan. Ini juga berfungsi sebagai ringkasan data primer yang dapat diacu saat membahas analisis teoritis dan mendukung argumen tentang peran media sosial secara keseluruhan.

Tabel 1: Isu Kebijakan Pemerintah dan Wacana Publik di Media Sosial (April-Agustus 2025)

Isu Kebijakan/Peristiwa	Periode Wacana	Kebijakan Pemerintah Terkait	Platform Media Sosial Utama	Narasi/Sentimen Kunci	Dampak Signifikan
Protes 2025 & #IndonesiaGelap	Februari-Agustus 2025	Revisi UU TNI, Program Makan Bergizi Gratis, Inpres 1/2025 (pemotongan anggaran)	Twitter/X, TikTok	Kritik satir terhadap korupsi & tata kelola, kekhawatiran dwifungsi ABRI, ekspresi kemarahan moral & resistensi ideologis	Mobilisasi protes, amplifikasi sentimen negatif, pembentukan narasi kontra-pemerintah
Revisi UU TNI	Maret-Agustus 2025	Revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004	Media Online, Twitter/X, Instagram, TikTok, Threads, Facebook,	Media Online: positif (74%) – kebutuhan strategis. Medsos: negatif (81%)	Polarisasi opini antara media tradisional & media sosial, tekanan publik

			Quora	– kekhawatiran dwifungsi ABRI, kurang transparansi. Tagar: #TolakRevisi UUTNI, #TolakDwifungsiTNI, #IndonesiaGelap	terhadap legislasi
Putusan MK UU ITE (Pencemaran Nama Baik)	April 2025	Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 (UU ITE)	Media Sosial (umum)	Momentum penguatan demokrasi digital, pembatasan kriminalisasi kritik terhadap institusi, dorongan revisi menyeluruh UU ITE	Potensi peningkatan kebebasan berekspresi online, pengurangan efek spiral keheningan
Kasus Penangkapan Hakim Korupsi	April-Juni 2025	Penegakan hukum antikorupsi	Media Sosial (umum), YouTube	Tuntutan akuntabilitas, kritik terhadap "mafia peradilan," peningkatan kesadaran masalah korupsi	Peningkatan tekanan publik pada pemerintah untuk bertindak, fungsi kontrol sosial media sosial
Fenomena #KaburAjaDulu	Februari-Agustus 2025	Kebijakan ekonomi (upah, biaya hidup), kebijakan kontroversial lainnya	Twitter/X	Kekecewaan generasi Z terhadap kondisi ekonomi & kebijakan pemerintah, keinginan mencari kualitas hidup lebih baik di luar negeri	Pergeseran kekuatan opini dari pemerintah ke publik, potensi "viral based policy"

Protes meluas di Indonesia sejak Februari 2025 dan berlanjut hingga periode studi, dipicu oleh beberapa kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan-kebijakan ini mencakup revisi Undang-Undang Tentara

Nasional Indonesia (UU TNI), program makan bergizi gratis, dan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebabkan pemotongan anggaran besar-besaran.

Media sosial menjadi kanal utama amplifikasi protes ini, dengan tagar #IndonesiaGelap menjadi sangat viral, mencapai lebih dari 14 juta *tweets* dalam waktu 24 jam. Tagar ini berfungsi sebagai kritik satir terhadap korupsi sistemik dan kegagalan tata kelola pemerintah. Narasi #IndonesiaGelap dikonstruksi dan disebar di platform seperti TikTok, menggunakan metafora olahraga seperti "liga korupsi" dan bahasa hiperbolis, yang efektif dalam membingkai korupsi sebagai tontonan dramatis tanpa akhir. Pada tingkat sosial, tagar ini berfungsi sebagai ekspresi kolektif kemarahan moral dan simbol mobilisasi resistensi ideologis. Viralnya #IndonesiaGelap dengan 14 juta *tweets* bukan sekadar indikator popularitas, melainkan bukti nyata kapasitas media sosial untuk mobilisasi massa dan pembentukan opini publik yang masif. Penggunaan narasi satir dan hiperbolis menunjukkan bagaimana pembingkai dapat dilakukan secara organik dari bawah ke atas, tanpa perlu media tradisional sebagai *gatekeeper* utama. Ini berarti media sosial telah menjadi kekuatan independen yang mampu menciptakan kontra-narasi yang kuat terhadap narasi pemerintah. Kemampuan untuk mengorganisir dan menyuarakan ketidakpuasan secara kolektif melalui tagar viral memberikan tekanan signifikan pada pemerintah, menunjukkan bahwa opini publik yang terbentuk di media sosial dapat memiliki dampak langsung pada stabilitas sosial dan politik, bahkan memicu protes di dunia nyata.

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada Maret 2025 memicu gelombang reaksi publik yang signifikan, terutama di platform X (Twitter), menyusul rapat Panitia Kerja (Panja) yang kontroversial. Analisis Drone Emprit mengungkapkan lebih dari 44.000 *mentions* di media sosial dan 10.900 *mentions* di media online terkait isu ini.²⁵ Terdapat disparitas sentimen yang mencolok: media online cenderung menampilkan pemberitaan positif (74%), menganggap revisi UU TNI diperlukan untuk kebutuhan strategis. Namun, media sosial menunjukkan dominasi sentimen negatif (81%) karena kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kembalinya "dwifungsi ABRI" dan kurangnya transparansi dalam proses legislasi. Tagar penolakan seperti #TolakRevisiUUTNI, #TolakDwifungsiTNI, dan #IndonesiaGelap menjadi viral, mencerminkan anggapan masyarakat bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam kehidupan sipil.

Perbedaan tajam antara sentimen positif di media online dan sentimen negatif yang dominan di media sosial terkait RUU TNI adalah sebuah kontradiksi yang krusial. Ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang yang lebih kritis dan kurang tersaring dibandingkan media online tradisional, yang mungkin memiliki agenda atau kepentingan tertentu. Disparitas ini mengindikasikan adanya "celah opini" yang signifikan di ruang publik Indonesia. Media sosial mampu menyoroiti kekhawatiran masyarakat yang mungkin kurang terwakili atau bahkan diredam di media *mainstream*, terutama terkait isu-isu sensitif seperti potensi kembalinya dwifungsi ABRI. Ini menempatkan media sosial sebagai platform penting untuk kontrol sosial dan pembentukan opini publik yang menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah.

Pada 17 April 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tiga bagian dari KUHP yang mengkriminalisasi penyebaran berita palsu dan pencemaran nama baik sebagai inkonstitusional. Putusan ini secara luas disambut sebagai kemenangan kecil namun signifikan bagi kebebasan berekspresi. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 ini menguatkan tafsir bahwa ketentuan pencemaran nama baik hanya berlaku untuk individu, bukan institusi atau korporasi. Ini secara efektif membatasi kriminalisasi kritik yang ditujukan kepada badan publik dan menegaskan bahwa "kerusuhan digital" atau "ribut-ribut di media sosial" tidak lagi dapat menjadi dasar penjeratan pidana tanpa dampak nyata di dunia fisik. Amnesty International Indonesia (2025) melihat putusan ini sebagai momentum untuk revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah lainnya dalam UU ITE.

Putusan MK ini secara langsung berkaitan dengan ketakutan akan isolasi yang menjadi inti Teori Spiral Keheningan. Dengan mengurangi risiko hukum bagi individu yang mengkritik institusi

pemerintah, putusan ini secara kausal menurunkan ambang batas bagi ekspresi opini yang berbeda atau minoritas di media sosial. Hal ini berpotensi menciptakan iklim opini yang lebih berani dan kurang tersensor di media sosial, terutama dalam hal kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Masyarakat mungkin merasa lebih bebas untuk menyuarakan ketidakpuasan tanpa kekhawatiran berlebihan akan jeratan hukum, sehingga menghasilkan representasi opini publik yang lebih otentik dan beragam di ranah digital.

Pada 14 dan 15 April 2025, Kantor Kejaksaan Agung menangkap empat hakim yang diduga menerima suap dalam kasus korupsi, menyusul putusan mereka yang membebaskan tiga perusahaan kelapa sawit. Hingga April 2025, total tujuh hakim telah terjerat kasus suap. Kasus korupsi ini, termasuk kematian salah satu terdakwa utama dalam kasus timah (RS) yang menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan proses hukum dan pemulihan kerugian negara, menjadi sorotan publik yang intens.

Media sosial memainkan peran krusial dalam mengungkapkan kasus korupsi, meningkatkan transparansi, dan memantau pejabat publik, meskipun ada risiko penyebaran informasi palsu atau tidak terverifikasi. Opini publik yang terbentuk cenderung menuntut hukuman berat bagi para pelaku korupsi. Kasus korupsi pejabat tinggi adalah isu dengan salience tinggi dan muatan moral yang kuat. Media sosial, dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan memfasilitasi diskusi massal, secara efektif menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan tuntutan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kuat, mampu membentuk opini publik yang menuntut tindakan konkret dari pemerintah dan lembaga penegak hukum. Opini publik yang terbentuk di media sosial dalam kasus-kasus seperti ini dapat memberikan tekanan signifikan pada pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, bahkan memengaruhi arah proses hukum.

Fenomena tagar #KaburAjaDulu menjadi viral di media sosial, terutama di platform X, pada Februari 2025. Tagar ini mencerminkan kekecewaan mendalam generasi Z terhadap kondisi di Indonesia, termasuk upah rendah, biaya hidup tinggi, kurangnya apresiasi terhadap tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah yang kontroversial, yang mendorong keinginan untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik di luar negeri. Muncul pula konsep "viral based policy," yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi atau bereaksi terhadap tren viral di media sosial. Alinea.ID (2025) bahkan memperingatkan bahwa kebijakan berbasis viral dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Fenomena #KaburAjaDulu adalah manifestasi langsung dari ketidakpuasan generasi muda yang diamplifikasi oleh media sosial. Konsep "viral based policy" adalah konsekuensi kausal dari fenomena ini, menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya merefleksikan opini, tetapi juga dapat secara langsung *memaksa* pemerintah untuk mempertimbangkan atau bahkan merespons kebijakan berdasarkan tren viral. Ini menandai pergeseran kekuatan dari pemerintah ke publik di ranah digital, di mana opini yang terbentuk secara viral dapat mendikte respons kebijakan. Meskipun ini dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap suara rakyat, peringatan tentang gangguan stabilitas ekonomi menyoroti risiko signifikan dari kebijakan yang didorong oleh tren sesaat atau sentimen emosional daripada analisis rasional dan komprehensif.

Mekanisme Konstruksi Opini Publik di Media Sosial

Konstruksi opini publik di media sosial tidak terjadi secara pasif, melainkan melalui berbagai mekanisme aktif yang melibatkan interaksi kompleks antara pengguna, konten, dan algoritma platform. Influencer, individu dengan jumlah pengikut yang besar dan kredibilitas di bidang tertentu, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik di media sosial, khususnya Instagram. Kredibilitas dan keaslian konten mereka meningkatkan efektivitas dalam memengaruhi pandangan audiens. Calon dan partai politik menggunakan media sosial untuk kampanye digital, membagikan visi, misi, dan program kerja mereka, yang dapat memengaruhi pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa peran media sosial dalam kampanye politik semakin signifikan dari waktu ke waktu, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menciptakan polarisasi.

Pemerintah sendiri juga telah memanfaatkan influencer untuk mempromosikan program dan kebijakan publik, meskipun praktik ini memicu kontroversi terkait transparansi dan penggunaan anggaran. Influencer dapat membangun koneksi langsung dengan audiens dan mempromosikan pesan secara efektif melalui konten yang menarik, seperti video, gambar, dan teks. Selain itu, media sosial memiliki potensi untuk membuat kampanye menjadi viral, di mana pesan atau konten yang menarik dapat dengan cepat disebarluaskan oleh pengguna, meningkatkan visibilitas dan dukungan terhadap suatu isu atau kandidat.

Media sosial memungkinkan diskusi dan debat antar pengguna tentang topik-topik politik, yang pada gilirannya dapat membentuk opini dan pandangan politik mereka. Melalui *likes*, *shares*, dan komentar, media sosial dapat menciptakan persepsi tentang popularitas dan dukungan publik terhadap calon atau isu tertentu. Sifat media sosial yang interaktif dan dinamis memungkinkan pengguna untuk secara aktif berpartisipasi dalam diskusi politik, baik dengan menyebarkan konten, mengomentari postingan, atau ikut serta dalam kampanye daring. Hal ini juga berarti bahwa suara-suara minoritas atau kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terwakili dalam media tradisional kini memiliki kesempatan untuk didengar dan berkontribusi dalam pembentukan opini publik yang lebih beragam dan berbasis fakta. Sayangnya, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan misinformasi dan hoaks yang dapat memengaruhi pemikiran masyarakat, membingungkan pemilih, dan merusak integritas wacana publik. Data menunjukkan adanya berbagai isu hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial terkait kebijakan pemerintah dan isu-isu publik lainnya sepanjang periode April hingga Agustus 2025.

Fenomena "gelembung filter" (*filter bubble*) dan "ruang gema" (*echo chamber*) adalah tantangan signifikan di media sosial. Algoritma media sosial cenderung menghadirkan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan pengguna, sehingga mereka cenderung terpapar hanya pada pandangan yang sejalan dengan mereka. Hal ini dapat mengurangi keragaman dan pluralitas dalam opini publik, serta memperburuk polarisasi politik. Akibatnya, media sosial dapat memperkuat polarisasi dan konflik di antara kelompok masyarakat, karena pengguna cenderung hanya terpapar pada pandangan yang selaras dengan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, literasi media menjadi kunci bagi masyarakat agar mampu membedakan konten yang kredibel dari yang menyesatkan. Keterampilan kritis diperlukan untuk memeriksa sumber, memahami pembungkaman, dan mengenali bias dalam informasi yang diterima. Analisis sentimen terhadap data media sosial, seperti yang dilakukan pada wacana PPKM di Twitter, dapat membantu mengklasifikasikan opini menjadi positif, negatif, atau netral, memberikan bahan evaluasi yang berharga bagi pemerintah.

KESIMPULAN

Media sosial telah menjadi kekuatan transformatif dalam mengkonstruksi opini publik terkait kebijakan pemerintah di Indonesia, khususnya pada periode April hingga Agustus 2025. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga sebagai arena dinamis di mana opini publik terbentuk, diperdebatkan, dan dimobilisasi. Pembentukan opini publik di media sosial berlangsung dengan kecepatan dan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Isu-isu kebijakan pemerintah dengan cepat menjadi viral, memicu diskusi massal dan pembentukan sentimen yang kuat. Fenomena seperti #IndonesiaGelap dan sentimen negatif terhadap Revisi UU TNI menunjukkan kemampuan media sosial untuk menjadi katalisator gerakan sosial dan pembentuk kontra-narasi yang signifikan terhadap agenda pemerintah. Media sosial juga terbukti menjadi barometer opini publik yang lebih kritis dan tidak tersaring dibandingkan media tradisional, menyoroti kekhawatiran masyarakat yang mungkin kurang terwakili di saluran *mainstream*.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU ITE menunjukkan bahwa kebijakan hukum dapat secara langsung memengaruhi iklim opini publik digital, berpotensi mengurangi efek spiral keheningan dan mendorong kebebasan berekspresi yang lebih besar. Selain itu, kasus penangkapan hakim korupsi menyoroti peran media sosial sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif, mampu meningkatkan

transparansi dan mendorong tuntutan akuntabilitas dari publik. Namun, pergeseran kekuatan opini ini juga membawa risiko, seperti munculnya "viral based policy" yang dapat menyebabkan kebijakan reaktif dan berpotensi mengganggu stabilitas. Mekanisme konstruksi opini publik di media sosial melibatkan peran signifikan influencer dan kampanye digital, yang mampu menjangkau basis dukungan yang luas dan membangun koneksi langsung dengan pemilih. Interaktivitas platform memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar, memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, tantangan besar seperti penyebaran misinformasi, hoaks, gelembung filter, dan polarisasi juga melekat pada ekosistem media sosial. Untuk mengoptimalkan manfaat media sosial dalam demokrasi dan meminimalkan dampak negatifnya, literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat dan strategi komunikasi pemerintah yang lebih transparan, responsif, dan inklusif menjadi krusial. Pemerintah perlu memahami bahwa opini publik di media sosial adalah cerminan kompleks dari berbagai realitas yang terfragmentasi, menuntut pendekatan yang adaptif dan berbasis data dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Mona, N. (2024). Strategi Komunikasi Politik melalui Media Sosial oleh Calon Presiden Indonesia 2024. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 1-20.
- Alfani, H., Rustanta, R., Oktivera, P., & Lee, J. (2023). Media Framing Against Identity Political Orientation as a Representation of Political Interests Ahead of the 2024 Presidential Election. *KnE Social Sciences*.
- Alinea.ID. (2025, Juni 13). *Viral based policy, testing the waters yang ganggu stabilitas ekonomi*.
- Amnesty International Indonesia. (2025, April 30). *Putusan MK jadi momentum revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah UU ITE*.
- Anggitasari, O. D., & Ahmadi, M. A. (2025). Analisis Peran Influencer dalam Mempengaruhi Opini Publik di Media Sosial. *Hawalah: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2(4), 396-406.
- Arifin, T. S. N. (2025, Juli 9). *Media massa dan perannya dalam membangun wacana publik*. LLDIKTI Wilayah V.
- Citra, D., Agustin, L. A., Saputri, L. E., Alif, M. H., & Nisa, P. K. (2024). Pembentukan Opini Publik dalam Fenomena "Buat Apa Sekolah?" di Aplikasi TikTok. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(4), 17-27.
- Dashti, A. A., Al-Abdullah, H. H., & Johar, H. A. (2015). Social Media and the Spiral of Silence: The Case of Kuwaiti Female Students Political Discourse on Twitter. *Journal of International Women's Studies*, 16(3), Article 4.
- DataReportal. (2025, Januari). *Digital 2025 Indonesia*.
- DetikNews. (2020, September 1). *"Influencer" dan Kebijakan Publik*.
- Diskominfo Jateng. (2025, Juli 31). *Daftar Info Hoax Per-Hari*.
- DPR RI. (2025, Mei). *Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk terus menjadi sorotan publik*.
- Drone Emprit. (2025, Maret 20). *Analisis Drone Emprit: Revisi UU TNI Picu Perdebatan Publik di Media Sosial*. Bisnis.com.
- Gramedia. (n.d.). *Pengertian Opini Publik*.
- Human Rights Watch. (2025). *World Report 2025: Indonesia*.
- IDEA. (2025, April). *Indonesia: Court ruling limits scope of defamation claims*.

- JIC Nusantara. (2025, Januari 3). *Dampak Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat*.
- Kompas.com. (2025, April 15). *Hingga April 2025, Sudah Ada 7 Hakim yang Terjerat Kasus Suap*.
- Liliweri, A. (2024). *Analisis Wacana Kritis Media dalam Pemberitaan Peristiwa Kerusuhan Mahasiswa Papua di Surabaya*. *Jurnal Ilmu Sosial Islam*, 7(2).
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Metro TV. (2025, Mei 1). *MK Revisi UU ITE, 'Rusuh' di Ruang Digital Tidak Lagi Jadi Tindak Pidana*.
- Mufidah, S., Risna, R., & Haliq, A. (2025). Critical Discourse Analysis of the 'Indonesia Gelap' Issue on the Meet Nite Live TikTok Account: Dissecting Political Narratives in the Social Media Era. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1114–1125.
- Naufal, M. (2022). Analisis Sentimen pada Media Sosial Twitter Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Deep Learning. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 8(2), 172-180.
- Nofasari, N. (2025, Februari 14). *Fenomena #KaburAjaDulu 2025: Protes Generasi Z terhadap Kondisi Indonesia*. Redaksiku.com.
- Noelle-Neumann, E. (1984). *The Spiral of Silence: Public Opinion—Our Social Skin*. University of Chicago Press.
- Nurbaiti, A. R. M. (2025, Maret). *Munculnya Sentimen Publik #TolakRevisiUUTNI Terhadap Revisi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Pew Research Center. (2014, Agustus 26). *Social Media and the 'Spiral of Silence'*.
- Pew Research Center. (2020). *The Future of Truth and Misinformation Online*.
- Prabowo, P. (2025, April 8). *Presiden Prabowo Tekankan Dasar Kebijakan Pemerintah Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra, N., & Eriyanto, E. (2018, Desember). *Spiral of Silence on Social Media: Study on Political Posting in Indonesia*. Paper presented at the 1st Sampoerna University-AFBE International Conference.
- Ridwan, M. F. (2024, Maret 7). *Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Opini Publik*. Geotimes.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, Agustus 1). *Optimalkan Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Terbitkan Inpres 8/2025*.²³
- UII. (2025, Juni 25). *Agenda Setting Theory: How Media Shapes Public Focus*. Communication Department, Universitas Islam Indonesia.
- UI. (2012). *Teori Spiral Kesunyian dan Negara Transisi Demokrasi: Sebuah Pengujian di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Massa Indonesia*, 5(1), 1-14.
- Unismuh. (2025, April 30). *Putusan MK soal UU ITE, Dosen Unismuh: Momentum Penguatan Demokrasi Digital*.
- Untag. (n.d.). *Pengaruh Media Massa dalam Membentuk Opini Publik*. Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Universitas Islam Riau. (2025). *CNN Indonesia's Framing Strategy in Influencing Public Opinion*. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 5(1), 1-12.
- Universitas Mulawarman. (2020). *Analisis Sentimen Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Pandemi Covid-19 Pada Twitter*. *Jurnal Informatika*, 14(2), 1-10.

Warunayama. (n.d.). *Peran Media Sosial dalam Mengungkapkan Kasus Korupsi dan Dampak terhadap Opini Publik*. Caus a: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 1(1), 1-15.